

PEMILIHAN BAHAN AJAR PADA RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013

(Studi Kasus di SMK N 1 Klaten dan SMK PGRI Pedan)

Annisa Fitriani

K6416009

Annisa_16@student.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi pemilihan bahan ajar yang dilakukan guru pada rencana pelaksanaan pembelajaran PKn di SMK Kabupaten Klaten. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan bahan ajar PKn di SMK PGRI dalam pemilihan bahan ajar sudah baik karena sesuai dengan tujuan pembelajaran, kesuaian karakteristik peserta didik, dan keruntutan uraian materi. Sedangkan pemilihan bahan ajar di SMK N 1 Klaten kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang di tentukan, tetapi dalam kesuaian karakteristik peserta didik, dan keruntutan uraian materi sudah dapat dikatakan baik.

Kata kunci : Bahan ajar, rencana pelaksanaan pembelajaran, PPKn, tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, keruntutan materi

ABSTRACT

This writing aims to determine the extent to which the implementation of the selection of teaching materials in the implementation plan of PKn learning is applied by teachers at the Klaten District Vocational School. The research method used is a qualitative method with a descriptive analytic approach. The results showed that the selection of PKn teaching materials at the PGRI Vocational School in the selection of teaching materials was good because it was in accordance with the learning objectives, the characteristics of the students, and the material breakdown. While the selection of teaching materials in Klaten N 1 VOC is not in accordance with the intended learning objectives, but in the suitability of the characteristics of the students, and the breakdown of material descriptions can be said to be good.

Keywords: Teaching materials, learning implementation plan, PKn, learning objectives, characteristics of students, material chaos

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman abad 21 menuntut peserta didik untuk memiliki kompetensi antara lain memiliki kemampuan berpikir kritis dan kemampuan menghadirkan pemecahan masalah (critical-thinking and problem solving skills), kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (communication and collaboration), kemampuan mencipta dan membaharui (creativity and innovation skills), kemampuan literasi teknologi informasi dan komunikasi (information and communications technology literacy), kemampuan belajar kontekstual (contextual learning skills), dan kemampuan informasi dan literasi media (information and media literacy skills) (BSNP, 2010:44-45) [1]. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paige (2009:67) bahwa keterampilan abad 21 menitikberatkan kepada kemampuan untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah, komunikasi dan kerjasama yang merupakan bagian dari HOTS (High Order Thinking Skills) atau kemampuan berpikir tingkat tinggi [2]. Begitu pula menurut Cogan & Derricott (1998:116) bahwa salah satu tantangan globalisasi di abad 21 menuntut semua orang memiliki karakteristik yang salah satunya memiliki kemampuan kritis dan sistematis[3].

Pengalaman menunjukkan bahwa implementasi Pancasila melalui jalur

pendidikan dilakukan dengan memuatkannya sebagai bagian dari materi pembelajaran (instructional material)

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) di Indonesia. Upaya menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai sarana bagi sosialisasi Pancasila ini pernah dilakukan pada masa Orde Lama yakni dengan pelajaran Civics (1960), Orde Baru, dengan menerapkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) kurikulum 1975, 1984 dan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berdasar kurikulum 1994. Orde reformasi dengan pelajaran Kewarganegaraan (2004), Pendidikan Kewarganegaraan (2006) dan PPKn (2013) .

Hasil pengamatan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelajaran dan metode penugasan melalui buku-buku yang tersedia kurang respons positif dari siswa sehingga sebagian besar siswa cukup di kelas, tampak bosan dan menerima pelajaran yang diajarkan tanpa benar-benar memahami apa yang sebenarnya disampaikan oleh guru . Kesulitan pemahaman siswa adalah bahwa materi dalam buku disajikan dengan cara yang monoton, konvensional dan tidak fokus untuk membuatnya lebih mudah bagi siswa untuk memahami pesan moral yang ada dalam materi pelajaran PPKn karena hanya menampilkan materi tanpa terkait dengan kehidupan nyata

di sekitar siswa [4]. Pancasila dan ideologi nasionalisme yang terkandung dalam buku teks Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dimasukkan sebagai salah satu bahan ajar. Bahan ajar Pancasila mencakup posisi dan isi.[5].

Berdasar pengalaman di atas, Pancasila selalu menjadi bagian dari materi pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Artinya Pancasila menjadi muatan materi dari PKn. Pancasila sebagai konsep sendiri memiliki makna dan penjelasan yang beragam sejalan dengan pendekatan pemikiran yang dilakukan. Dengan demikian patut dipertanyaan perihal isi Pancasila apakah dan nilai-nilai Pancasila yang manakah yang seyogyanya dapat dijadikan muatan materi dalam Pendidikan Kewarganegaraan saat ini belum terumuskan secara jelas dan benar.

Persoalan tentang muatan materi Pancasila dalam PKn juga penting untuk dijelaskan oleh karena Pancasila sendiri sebagai objek kajian atau muatan PKn di Indonesia telah lama diakui dan dijalankan. Materi Pancasila dapat dikatakan sebagai bahan PKn yang bersifat “The Great Ought” dimana setiap bangsa pasti akan melakukan internalisasi bahan tersebut sebagai persyaratan objektif bangsa yang bersangkutan (Numan Somantri, 2001) [6]. Materi Pancasila dalam PKn termasuk structural formal content yang bersifat tetap dan

menjadi pemersatu (Sapriya, 2007). Sebagai materi yang bersifat “The Great Ought” dan termasuk structural formal content seharusnya materi Pancasila bersifat tetap dan tidak berubah [7].

Perubahan kurikulum yang berlaku di Indonesia mengakibatkan timbulnya berbagai masalah, salah satunya yaitu dalam pengimplementasiannya. Guru selaku pelaku pendidik selalu mengalami kendala dalam mengimplementasikan kurikulum terbaru dalam proses pembelajaran. Sebelum guru melaksanakan pembelajaran diwajibkan membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan [8]. Perencanaan pembelajaran merupakan catatan-catatan hasil pemikiran awal seorang guru sebelum mengelola proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan perisapan mengajar yang berisi hal-hal yang perlu atau harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang antara lain meliputi unsur-unsur: pemilihan materi pembelajaran, metode, media, dan alat evaluasi.

Salah satu komponen pendukung perencanaan dan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah bahan ajar. Bahan ajar memiliki peran penting

bagi guru maupun siswa sebab bahan ajar merupakan salah satu syarat untuk mencapai pembelajaran efektif dan efisien. Tanpa ketersediaan bahan ajar baik guru maupun peserta didik akan sulit untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Bahan ajar khususnya yang digunakan di sekolah tidak sekedar bahan materi yang digunakan sebagai sumber belajar melainkan harus memenuhi kualifikasi tertentu. Bahan ajar harus sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum. Hal tersebut sesuai dengan pendapat bahwa bahan ajar memuat materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik untuk mencapai tujuan pembelajaran [9].

Materi Pancasila dalam PKN termasuk structural formal content yang bersifat tetap dan menjadi pemersatu (Sapriya, 2007) [10]. Sebagai materi yang bersifat “The Great Ought” dan termasuk structural formal content seharusnya materi Pancasila bersifat tetap dan tidak berubah. Kajian ini penting untuk dilakukan oleh karena beberapa hal. Pertama, bahwa Pancasila sebagai sistem nilai yang telah diangkat sebagai dasar negara membutuhkan implementasinya dalam kehidupan. Kedua, implementasi Pancasila dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya melalui pendidikan. Ketiga, bahwa Pendidikan

Kewarganegaraan (PKN) memiliki kaitan erat dengan Pancasila. Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara merupakan bagian dari ontologi PKN. Keempat, isi atau muatan Pancasila yang disosialisasikan kepada warga dapat digunakan untuk membangun identitas atau jatidiri bangsa, oleh karena Pancasila diakui menjadi dasar bagi pembangunan identitas bangsa Indonesia dan merupakan salah satu unsur dari identitas itu sendiri. Kelima, isi Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia masih menghadapi kelemahan dalam hal metode pembelajaran yang cenderung indoktrinatif dan juga muatan Pancasila itu sendiri yang cenderung ditafsirkan sebagai sarana untuk melegitimasi kekuasaan yang ada. Keenam, Pancasila yang memiliki beragam status, makna, dan tafsiran membutuhkan penataan dan pengorganisasian yang jelas sebagai materi PKN. Ketujuh, sepanjang pengetahuan penulis, sampai saat ini belum ada kajian akademik yang secara khusus menganalisis dan merumuskan materi Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di sekolah mengingat pengalaman bahwa Pancasila selalu menjadi isi PKN.

Isi PKN Mengacu pendapat Margaret Stimman Branson (1998), komponen utama dari Pendidikan Kewarganegaraan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu civic knowledge, civic

skills, dan civic dispositions. Civic knowledge berkaitan dengan isi atau apa yang seharusnya warganegara ketahui. Civic skills merupakan ketrampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh warganegara yang mencakup; ketrampilan intelektual dan ketrampilan partisipasi. Sedangkan civic dispositions berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warganegara yang perlu dipelihara dan ditingkatkan dalam demokrasi konstitusional [11].

Sapriya (2007) dengan mendasarkan pada pendapat Hanna dan Lee (1962) mengemukakan bahwa content untuk Social Studies dapat meliputi 3 (tiga) sumber, yaitu pertama, informal content yang dapat ditemukan dalam kegiatan masyarakat, kegiatan anggota DPR, kegiatan pejabat, dan lain-lain. Kedua, the formal content disciplines yang meliputi geografi, sejarah, ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, antropologi, dan yurisprudensi. Ketiga, the response of pupils yaitu tanggapan siswa baik yang bersifat informal content maupun formal content. Bahan ini dapat dikembangkan pada isi atau content PKn dengan catatan perlu disesuaikan dengan visi, misi, dan karakteristik PKn [12].

Jika dikaitkan dengan formal content discipline maka bahan PKn dapat diambilkan dari ilmu politik yakni civics atau ilmu kewarganegaraan. Secara keilmuan, apabila bertolak dari ilmu

kewarganegaraan (civics) yang merupakan cabang dari ilmu politik, maka bahan ajar untuk PKn menfokuskan pada demokrasi politiknya yang selanjutnya masih perlu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan siswa atau disebut basic human activities [13].

Pancasila termasuk konten (isi) PKn yang sifatnya formal structure. Menurut Sapriya (2007) isi yang bersifat formal structure harus sama dan tidak bisa ditawar-tawar (unnegotiated, given) karena merupakan unsur perekat dan pemersatu bangsa yang akan memperkuat semangat kebangsaan Indonesia. Numan Somantri (2001) menyebut Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai bahan PKn Indonesia yang bersifat “The Great Ought”, termasuk Unavoidable Indotration, yang perlu diinternalisasikan kepada warga negara.

Pengertian Bahan Ajar Menurut National Centre for Competency Based Training bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas [14]. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun tak tertulis. Menurut Prastowo (2011:17) bahan ajar merupakan segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai

peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran [15]. Menurut Pannen bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran [16]. Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan segala bentuk bahan (baik informasi, alat maupun teks) yang disusun secara sistematis yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga mampu menunjang dan mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran

Terdapat beberapa kategori untuk jenis-jenis bahan ajar. Ada beberapa kriteria yang menjadi acuan dalam membuat klasifikasi jenis-jenis bahan ajar yang diungkapkan Prastowo tersebut. Berdasarkan bentuknya bahan ajar dibedakan menjadi empat macam, yaitu bahan cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar pandang dengar, dan bahan ajar interaktif. Bahan cetak (printed), yakni sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi menurut Kemp dan Dayton. Contohnya, handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchat, foto atau gambar, dan model atau maker.

Bahan ajar dengar atau program audio yakni semua system yang menggunakan sinyal radio secara langsung, yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk audio. Bahan ajar pandang dengar (audiovisual) yakni segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Contohnya, video compact disk dan film. Bahan ajar interaktif (interactive teaching materials), yakni kombinasi dari dua atau lebih media (audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video) yang oleh penggunaannya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah dan atau perilaku alami dari suatu presentasi. Contohnya, compact disk interactive [17].

Fungsi dan Tujuan Pembuatan Bahan Ajar Menurut Prastowo disebutkan bahwa fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi bagi pendidik dan fungsi bagi peserta didik. Fungsi bahan ajar bagi pendidik, antara lain: Menghemat waktu pendidik mengajar. Mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Sebagai pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan

substansi kompetensi yang semestinya diajarkan kepada peserta didik. Sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran [18].

Fungsi bahan ajar bagi siswa, antara lain: Siswa dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman peserta didik yang lain. Siswa dapat belajar kapan saja dan dimana saja ia kehendaki. Siswa dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing. Siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Membantu potensi siswa untuk menjadi pelajar/mahasiswa yang mandiri. Sebagai pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya.

Menurut Prastowo tujuan pembuatan bahan ajar yaitu: Membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu, Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar, sehingga mencegah timbulnya rasa bosan pada peserta didik, Memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran, agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik [19].

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara (Kerr, 2013) [20]. Merujuk

pada pendapat di atas, peran pendidikan termasuk di dalamnya perguruan tinggi, dosen dan proses belajar, dalam proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga Negara. Sejalan dengan pendapat tersebut Buchanan, Buridge, Chodkiewicz (2018) mengemukakan bahwa mata kuliah PKn merupakan media pengajaran yang meng-Indonesiakan para mahasiswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab[21]. Karena itu, mata kuliah PKn memuat konsep-konsep umum ketatanegaraan, politik dan hukum negara, serta teori umum yang lain yang cocok dengan target tersebut. Senada dengan pengertian di atas, Winarno (2017) berpendapat bahwa mata kuliah PKn sebagai penyiapan generasi muda untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakatnya. Merujuk pada pendapat-pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa mata kuliah PKn merupakan mata kuliah yang mempersiapkan generasi muda dalam ketaatan pada hukum, ketatanegaraan politik dan kesadaran dalam bernegara, yang berkarakter bangsa Indonesia, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat sesuai ketentuan Pancasila dan UUD 1945 [22].

Dalam pemilihan bahan ajar perlu memperhatikan relevansi dengan keadaan sekarang ini. Hal ini serupa dengan pendapat Wijianto, Rima Vien (2017) selain memperhatikan jenis materi pembelajaran juga harus memperhatikan prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran, sedangkan kedalaman materi seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari/dikuasai oleh siswa [23].

Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan penelitian di SMK N 1 Klaten dan SMK PGRI Pedan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemilihan bahan ajar pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013.

METODE

Penelitian ini dikembangkan dengan metode induktif yang bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola hubungan temuan-temuan di lapangan, merumuskan hipotesis, dan menarik kesimpulan sehingga jenis penelitian kualitatif relevan

digunakan untuk mendeskripsikan mengenai sejauh mana implementasi pemilihan bahan ajar yang dilakukan guru pada rencana pelaksanaan pembelajaran PKn di SMK Kabupaten Klaten (Studi Kasus di SMK N 1 Klaten dan SMK PGRI Pedan). Metode pengumpulan data yang peneliti pergunakan yaitu dokumentasi, in depth interview (wawancara mendalam), dan observasi (Sugiyono, 2010: 297).

HASIL

A. SMK PGRI Pedan

1. Pemilihan bahan ajar

- a) Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran
Dalam pemilihan bahan ajar SMK PGRI Pedan sudah berdasarkan tujuan pembelajaran yang ditentukan di dalam RPP. Hanya saja dalam penyusunan tujuan pembelajaran kurang memperhatikan kesesuaian perumusan dengan aspek *Audience, Behaviour, Condition, dan Degree*.
- b) Kesesuaian dengan karakter peserta didik Keberlangsungan pembelajaran di sekolah dilakukan dengan penerapan

kurikulum 2013 dimana porsi guru lebih sedikit berbicara dan menekankan pada keaktifan siswa agar siswa SMK PGRI Pedan terbiasa untuk mandiri. Proses pembelajaran tidak terkendala oleh sarana prasarana. Semua prasarana sudah mendukung untuk pembelajaran seperti LCD, wifi. Kegiatan pembelajaran mengasah siswa untuk mandiri dengan pembelajaran berbentuk proyek maupun kerjasama kelompok. Kegiatan belajar di SMK PGRI Pedan menghindari pembelajaran dengan metode ceramah yang terlalu sering. Hal ini karena karakter siswa yang cenderung bosan dan malas jika pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah penuh setiap hari.

- c) Keruntutan uraian materi
 Dalam hal keruntutan materi sudah disusun secara runtut dan sistematis dari uraian

materi yang berupa konsep ke uraian materi yang lebih operasional. Sehingga siswa dapat memperoleh pemahaman materi secara sistematis, runtut dan memperoleh pengalaman pembelajaran yang utuh.

2. Kemampuan siswa dalam memahami materi
 Kemampuan siswa untuk memahami materi tergantung dari siswa itu sendiri. Di SMK PGRI Pedan siswa yang langsung memahami dengan sekali penjelasan ada namun jumlahnya sedikit sedangkan rata-rata pemahaman siswa masih kurang sehingga guru harus menjelaskan kembali kepada siswa tidak hanya sekali saja. Hal ini terkait dengan siswa SMK yang kebanyakan karakternya agak susah untuk diatur sehingga dalam menyampaikan materi agar dapat dipahami maka guru harus kreatif termasuk mengoptimalkan dalam

penggunaan metode dan model pembelajaran.

B. SMK N 1 Klaten

1. Pemilihan Bahan Ajar

a) Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran

Dalam pemilihan bahan ajar SMK N 1 Klaten tidak berdasarkan dengan tujuan pembelajaran yang tentukan di dalam RPP. Selain itu dalam penyusunan tujuan pembelajaran tidak mengacu dengan indikator yang telah di cantumkan dalam RPP, dan kurang memperhatikan kesesuaian perumusan dengan aspek *Audience, Behaviour, Condition, dan Degree*.

b) Kesesuaian dengan karakter peserta didik

Proses pembelajaran kurikulum K13 di SMK Negeri 1 Klaten berlangsung baik dan progresif. Guru hanya menjelaskan materi hanya pokok – pokoknya atau hanya garis besarnya saja, lalu peserta didik dituntut aktif dalam menggali materi.

Karakter peserta didik lebih mudah di kondisikan. Guru mengurangi metode ceramah yang dimana metode ceramah ini lebih cocok diterapkan dalam kurikulum KTSP. Peserta didik lebih banyak aktif berdiskusi dengan kelompok belajar yang ada di kelas.

c) Keruntutan uraian materi

Dalam hal keruntutan materi sudah disusun secara runtut dan sistematis dari uraian materi yang berupa konsep ke uraian materi yang lebih operasinal. Sehingga siswa dapat memperoleh pemahaman materi secara sistematis, runtut dan memperoleh pengalaman pembelajaran yang utuh.

2. Kemampuan siswa dalam memahami materi

Untuk kemampuan memahami materi pembelajaran di SMK N 1 Klaten tergantung pada kemampuan individual anak itu sendiri, akan

tetapi kebanyakan anak SMK Negeri 1 Klaten memahami materi dengan baik walaupun masih ada beberapa anak yang agak kesulitan dalam memahami materi. Jadi guru harus pandai dalam menyampaikan materi agar seluruh siswa dapat memahami materi dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan pengumpulan data melalui lembar observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa dalam implementasi pemilihan bahan ajar pada kurikulum 2013 pada SMK PGRI Pedan dan SMK N 1 Klaten dikatakan cukup baik. Hanya saja dalam menentukan kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran SMK PGRI Pedan lebih memperhatikan kesesuaian tersebut sedangkan SMK N 1 Klaten kurang memperhatikan hal itu. Tetapi untuk kesesuaian materi dengan karakter peserta didik dan keruntutan materi SMK PGRI Pedan dan SMK N 1 Klaten sudah menerapkannya dengan cukup baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Standar Nasional Pendidikan. (2010). Paradigma Pendidikan Nasional di Abad 21. Jakarta. BSNP
- [2] Paige, R.M. (2009). The georgetown consortium project: Interventions for student learning aboard fronticus. The interdisciplinary journal of study abroad, XVIII, 1-75.
- [3] Cogan, J.J. dan Derricot, R. (1998). Citizenship for the 21 st Century. British Library: London.
- [4] winarno, 2017. Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. AP3KnI
- [5] winarno, 2017. Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. AP3KnI
- [6] Somantri, Muhammad Numan. (2001). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: Rosda Karya
- [7] Sapriya. (2007). Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun Karakter Bangsa . Disertasi Pendidikan IPS. SPS UPI Bandung. Tidak diterbitkan.
- [8] Rusman. Model-model pembelajaran Mengembangkan Kompetensi Guru.2010.PT.Rajagrafindo Persada: Jakarta.

- [9] Ika Lestari. 2013. Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi. Padang: Akademia Permata.
- [10] Sapriya. (2007). Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun Karakter Bangsa . Disertasi Pendidikan IPS. SPS UPI Bandung. Tidak diterbitkan
- [11] Branson, S Margaret. (1998). "The Role of Civic Education, A Forthcoming Education Policy" Task Force Position Paper from the Communitarian Network. Tersedia di www.civiced.org.
- [12] Sapriya. (2007). Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun Karakter Bangsa . Disertasi Pendidikan IPS. SPS UPI Bandung. Tidak diterbitkan
- [13] Somantri, Muhammad Numan. (2001). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: Rosda Karya
- [14] Andi Prastowo. (2011). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: Menciptakan Metode Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan. Yogyakarta: Diva Press.
- [15] Andi Prastowo. (2011). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: Menciptakan Metode Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan. Yogyakarta: Diva Press.
- [16] Tian Belawati, dkk. (2003). *Pengembangan Bahan Ajar* . Jakarta: Pusat Penerbitan UT.
- [17] Andi Prastowo. (2011). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: Menciptakan Metode Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan. Yogyakarta: Diva Press.
- [18] Andi Prastowo. (2011). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: Menciptakan Metode Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan. Yogyakarta: Diva Press.
- [19] Andi Prastowo. (2011). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: Menciptakan Metode Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan. Yogyakarta: Diva Press.
- [20] Kerr. David, (2013), Citizenship Education in England: The Making of a New Subject. Journal Citizenship Education, Vol 2(235), 2013. <http://www.sowionlinejournal.de/2013.2/index.html>.
- [21] Buchanan. Jhon, & Buridge. Nina, & Chodkiewicz. Andrew, (2018).

Maintaining Global Citizenship Education in Schools: A Challenge for Australian Educators and Schools, Australian Journal of Teacher Education, Volume 43, Issue 4, 2018

[22] Winarno.(2017). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara.

[23] Camelia, Hassan & Wijianto.2017. Studi Analisis Konsistensi dan Kecukupan Bahan Ajar Materi Demokrasi pada Diklat Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X Tunarungu di SLB Negeri Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. PKn Progresif, Vol. 12 No. 2 Desember 2017